

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ekonomi di Universitas Negeri Padang*



Oleh
DEPI OKTIA RUSPINA
05344/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang)**

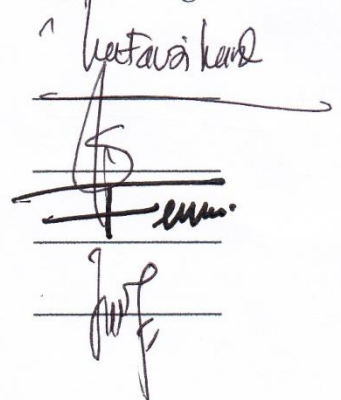
Nama : Depi Oktia Ruspina
NIM / BP : 05344 / 2008
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

Tim Penguji

- | | Nama |
|---------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak |
| 2. Sekretaris | : Salma Taqwa, SE, M.Si |
| 3. Anggota | : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak |
| 4. Anggota | : Lili Anita, SE, M.Si, Ak |

Tanda Tangan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Depi Oktia Ruspina
NIM/Thn. Masuk : 05344/2008
Tempat/Tagl. Lahir : Tl. Beringin Jaya/05 Oktober 1990
Program : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Karang Indah No. 23 B, Ulak Karang, Padang
No. Hp/Telepon : 085278852690
Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan *Good Governmace* (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2013

Yang menyatakan


Depi Oktia Ruspina
NIM. 05344/2008

ABSTRAK

Depi Oktia Ruspina : Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

Pembimbing : 1. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak.
Pembimbing : 2. Salma Taqwa, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance*. 2) Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. 3) Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan *good governance*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Responden adalah kepala dinas dan kepala bagian keuangan. Teknik pengambilan sampel adalah *total sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis regresi berganda dan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*, 2) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*, 3) Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap penerapan *Good Governance*.

Dalam penelitian ini disarankan : 1) Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga pemerintahan yang baik dapat terlaksana terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus cepat tanggap dalam menjelankan setiap keluhan publik atau masyarakat. Pegawai harus memiliki tingkat kreatifitas mencari tata kerja yang baik, 2) Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pada pemerintah pusat, agar semua karakteristik *good governance* berjalan dengan baik dan optimal untuk mengantisipasi terjadinya praktek KKN pada lingkungan SKPD, 3) Sistem pengendalian internal pemerintah sebaiknya menekankan kepada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut sehingga sistem pengendalian internal pemerintah bisa berjalan secara optimal. 4) Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*, seperti implementasi *financial audit*, *value for money* audit dan peran auditor internal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governnace* Kota Padang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Salma Taqwa, SE, M. Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini.

Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri padang.
3. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Kedua orang tua (Ayahanda Ahmad Surus, S.Pd dan Ibunda Dahliana, S.Pd) yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus ikhlas serta dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2008.
7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	12
1. Good Governance	12
2. Kinerja Aparatur Pemerintah.....	18
3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	30
B. Penelitian Relevan	33
C. Pengembangan Hipotesis	35
D. Kerangka Konseptual	40
E. Hipotesis Penelitian	42

BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Variabel Penelitian	45
F. Pengukuran Variabel	46
G. Instrumen Penelitian	47
H. Uji Coba Instrumen	48
I. Teknik Analisis Data	50
J. Definisi Operasional.....	56
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel dan Responden Penelitian	57
B. Analisis Deskriptif	58
C. Uji Validitas dan Reliabilitas	67
D. Uji Asumsi Klasik	69
E. Uji Model	72
F. Uji Hipotesis.....	75
G. Pembahasan.....	77
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Keterbatasan	82
C. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Kota Padang	44
2. Daftar Skor Pertanyaan Berdasarkan Sifat	47
3. Skala Pengukuran.....	47
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	48
5. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	49
6. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian	50
7. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	58
8. Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	58
9. Jumlah Responden Berdasarkan Bidang Keahlian yang ditempuh.....	59
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
11. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	60
12. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan <i>Good Governance</i>	62
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	64
14. Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah	65
15. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	66
16. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> terkecil	68
17. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	68
18. Uji Normalitas.....	70
19. Uji Multikolinearitas	71
20. Uji Heterokedastisitas	72

21. Hasil Koefisien Determinasi	72
22. Analisis Regresi Berganda	73
23. Uji F Hitung	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Konseptual	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar Kuesioner	87
2. Kuesioner Penelitian	88
3. Uji validitas dan Reliabilitas Instrumen	93
4. Uji validitas dan Reliabilitas Penelitian	97
5. Uji Asumsi Klasik	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh persiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, hanya memiliki otonomi nyata dan bertanggung jawab saja, dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 berubah menjadi daerah yang memiliki otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Kedua, sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab pula.

Menurut Salam (2004:19), “Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”.

Mardiasmo (2004:25) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Good Governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, apalagi dengan telah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsi-prinsip *Good Governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan *Good Governance*, yaitu belum melembaganya

karakteristik *Good Governance* didalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaedah *Good Governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Bastian (2001:329) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi.

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran/tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah menurut Gusmal (Wardani : 2010). Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada isu sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu *Good Governance*. *Good Governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan professional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penetapan *Good Governance*, dimana dengan menerapkan diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsif dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik *Good Governance*. Karakteristik tersebut diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif bagi pelaku *Good Governance* menurut Manan (Wardani : 2010).

Kinerja aparatur`pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah, paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi dibidang ini diperlukan, yaitu (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahun tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2006:27).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006:30). Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau

urusan. Sebelum masa otonomi, aturan pemerintah daerah membuat laporan keuangan tidak seketat sekarang. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksa eksternal (BPK).

Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengatur secara komprehensif dan terpadu (*omnibusregulatioan*) ketentuan-ketentuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mengakomodasikan berbagai substansi yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang di atas.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menurut Arens (2008:370) sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Unsur dari sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Soeseno (Wardani : 2010) menyatakan dengan adanya sistem pengendalian intern maka seluruh kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan (PP No 60 tahun 2008).

Pemerintah yang baik dan bersih dapat diukur dari *performance* aparturnya. Fakta di lapangan menunjukkan pelayanan birokrasi masih merupakan barang langka dan mahal. Untuk mendapatkan pelayanan, seringkali harus ada biaya tambahan dan ucapan terima kasih yang berlebihan. Terlebih bagi warga masyarakat yang awam dalam urusan administrasi negara. Birokrasi yang demikian tidak hanya menghambat tujuan reformasi tetapi juga telah menjadi sarang korupsi. Efektifitas kinerja aparatur negara di daerah pada umumnya sangat rendah, ini dapat dirasakan dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu, misalnya dalam pembuatan KTP dan surat-surat lainnya. Disini dapat dilihat bahwa aparatur pemerintah daerah yang tidak akuntabel dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan prinsip dasar *Good Governance*.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeny, Pemko Padang berhasil meraih Opini WTP dengan paragraf penjelasan. Artinya, masih ada sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemko Padang, meski cacatan tersebut dinyatakan tidak mempengaruhi laporan keuangan Pemko Padang tahun 2012. Ditegaskan, catatan dari BPK tersebut harus ditindaklanjuti

Pemko Padang dalam waktu 60 hari ke depan. Jika tidak, maka Pemko Padang terancam kena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Diantara catatan tersebut adalah kewajiban Pemko Padang untuk segera menyetorkan ke kas daerah sisa dana sertifikasi guru Triwulan I yang terlanjur dibayarkan. Jumlahnya tidak kecil, mencapai Rp2,1 miliar. Catatan lainnya adalah masalah pengelolaan dana bergulir yang belum dilunasi. Pihak BPK mengingatkan agar kewajiban tersebut bisa segera dilunasi. BPK juga mencatat adanya salah penganggaran belanja modal di PU dan catatan tentang adanya pembayaran personil unsur Muspida yang membenani anggaran daerah.(www.harianhaluan.com)

Penelitian ini belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* sejalan dengan penelitian terdahulu Tajuddin (Wardani : 2010) dalam implikasi *Good Governance* di Kabupaten Bangka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah serta faktor organisasi dan manajemen. Penelitian Jaeni (2003) tentang reformasi sistem keuangan daerah untuk menciptakan mekanisme *Good Governance*. Devfi (2008) mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Walaupun pada saat ini pemerintah telah menerapkan *Good Governance* pada pemerintah daerah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan

penyimpangan yang terdapat dalam tubuh pemerintahan daerah yang menyebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dan tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul “**Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*.**”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
3. Sejauhmana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan *Good Governance*.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *Good Governance*.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Sejauhmana kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
3. Sejauhmana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang :

1. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dapat mengetahui sejauhmana kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *Good Governance* pada instansi pemerintahan.
2. Bagi akademis, hasil penelitian dapat memberi pengetahuan tentang kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *Good Governance* dan bahan dalam penelitian selanjutnya tentang lembaga pemerintahan.
3. Bagi instansi yang diteliti, dapat memberikan masukan sehingga penerapan *Good Governance* dapat dilaksanakan agar dapat terwujudnya otonomi daerah yang sesungguhnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Dalam Mardiasmo (2007:17), *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *Good Governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Merujuk pada konsep tersebut, *Good Governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama dari *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan politik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku dan budaya kerjanya menurut Indriansyah (Wardani : 2010).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa UNDP lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat. *Political Governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic Governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administratif Governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Sementara itu Word Bank dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan definisi *Good Governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Word Bank mendefinisikan *Good Governance* adalah :

“Sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Dalam hal ini Word Bank lebih menekankan pada cara pemerintah, mengelola sumber daya, sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Jika mengacu pada program Word Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*. Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kata baik disini maksudnya mengikuti kaedah-kaedah tertentu maupun karakteristik dasar *Good Governance*.

b. Karakteristik *Good Governance*

UNDP memberikan karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi :

1) Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Aturan Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang *fair* dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama untuk kelompok minoritas. Penegakan hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan yang independen dan pihak kepolisian yang tidak korupsi.

3) Tansparansi

Tarnsparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat

disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap melaksanakan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholdersnya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi tersebut bersifat internal atau eksternal.

9) Bervisi Strategi

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Asian Development Bank (ADB) melalui Krina menegaskan konsensus umum bahwa *Good Governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu : (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pengelolaan yang baik sangat bervariasi, namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, salah satunya akuntabilitas yang dalam hal ini menyangkut untuk kepentingan publik.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, jelas bahwa *Good Governance* mempunyai tujuan yang lebih efisien dan penggunaan *resources* yang ekonomis. *Good Governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang

kuat dan juga untuk membuat pemerintah/publik semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Akan tetapi, konsep *Good Governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good “national” governance* maupun *good local governance*) yang handal yang tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* yaitu (K.A. Tajuddin) :

1) Faktor manusia pelaksana (*man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *Good Governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local govt*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Disamping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu pegawai daerah itu sendiri.

2) Faktor partisipasi masyarakat (*public participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *Good Governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat (*public participation*). Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian *Good Governance* adalah sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3) Faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self*

supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *Good Governance*. Ini berarti bahwa penerapan dan pencapaian *Good Governance* di daerah atau lokal membutuhkan dana/finansial.

2. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Dalam rangka mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program. Tetapi juga ada keluaran/ manfaat dari program tersebut.

Husnan (1996:241) mengemukakan bahwa kinerja merupakan pengukuran yang dapat dicapai oleh perusahaan yang mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan pada ukuran waktu tertentu. Sedangkan menurut Tugiman (1991:177) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai pada masa

lalu dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Menurut Keban (2000:83) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau tingkatan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan Bastian (2001:329) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan/kegiatan program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja mengarah pada suatu upaya dalam rangka mencapai hasil yang baik dalam periode tertentu. Seseorang hendaknya memiliki keinginan dan kemampuan usaha serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan tidak mengalami hambatan yang berarti dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemampuan yang tinggi dan usaha yang benar dapat menimbulkan dan menghasilkan motivasi yang besar sehingga tertuang dalam kegiatan pelaksanaan.

Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri (Tayibnapsis, 1993), sedangkan menurut Moerdiono (1998) mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari presiden republik.

Dengan kata lain aparatur negara atau aparatur adalah para pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan negara, baik yang bekerja didalam tiga badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai TNI dan PNS pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Dari aparat negara dan atau aparatur pemerintah,

diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini (Handayani, 1986). Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan atau *ability* sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik (Bibson, 1991), sedangkan *skill* atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas (Petopo, 1999).

Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Untuk itu, indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat pendidikan aparat;
- 2) Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal;
- 3) Kemampuan melakukan kerja sama;
- 4) Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi;
- 5) Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan;
- 6) Kecepatan dalam melaksanakan tugas;
- 7) Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik;
- 8) Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan;
- 9) Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Menurut Sedarmayanti (2004) mengatakan bahwa kinerja paratur adalah seperangkat proses untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang

harus dicapai, bagaimana hal ini harus dicapai dan bagaimana mengatur orang dengan cara yang tepat untuk meningkatkan tercapainya tujuan. Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari misi, visi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan.

Aktivitas kinerja aparatur pemerintah daerah adalah (Sedarmayanti, 2004):

1) Merancang Kinerja

Rencana kinerja yang dicapai pada waktu yang akan datang merupakan perpaduan keinginan individu dan tujuan instansi.

2) Pengelolaan Kinerja

Setelah rencana kerja ditetapkan, menganalisis kekuatan organisasi guna menentukan rencana perubahan, pembaharuan terhadap kekuatan yang mungkin menghambat dan mungkin dioptimalkan serta memilih strategi dan langkah, termasuk tenaga yang diberi tanggung jawab melaksanakannya dengan sumber lain.

3) Peninjauan Kinerja

Setelah kinerja yang ingin dicapai, dan rencana kegiatan yang akan dilakukan serta orang yang diberi tanggung jawab ditetapkan, kemudian memantau pelaksanaan dan hasil kerja, memberi umpan balik dan dukungan.

4) Penghargaan atas Kinerja

Menyampaikan sikap, pendapat bernuansa motivasi, memacu perbaikan peningkatan kinerja sebagai salah satu penghargaan atas kinerja yang dicapai.

Agar kinerja aparatur pemerintah berjalan dengan efektif hendaknya memenuhi syarat-syarat (Sedarmayanti, 2007):

1) *Relevance*

Hal atau faktor yang diukur relevan (terkait) dengan pekerjaannya (output, proses atau inputnya).

a) *Sensitivity*

Sistem yang digunakan harus peka untuk membedakan aparat yang berprestasi dan tidak.

b) *Realibility*

Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya, menggunakan tolak ukur objektif, akurat, konsisten dan stabil.

c) *Acceptability*

Sistem yang digunakan dimengerti dan diterima aparat yang menjadi penilai dan yang dinilai serta memfasilitasi komunikasi aktif dan konstruktif.

d) *Practicality*

Semua instrument yang digunakan harus mudah digunakan semua pihak. Seluruh aparatur pemerintahan memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dan masyarakat berhak mengawasi pelayanan ini. Dalam pelaksanaan *Good Governance*, diharapkan aparatur pemerintah memberikan layanan prima yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, disebutkan bahwa asas pelayanan publik adalah :

- (1) Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- (2) Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektif.
- (4) Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (5) Kesamaan hak tidak diskriminatif (tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi).

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai dan melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi (Sedarmayanti, 2004) :

- 1) Indikator masukan (*input*) adalah menekankan pada pengukuran atau penilaian ciri kepribadian karyawan dengan hasil (prestasi) kerjanya. Ciri atau karakteristik kepribadian yang dijadikan objek pengukuran adalah kejujuran,

ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreatifitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan), sopan santun dan lain-lain.

- 2) Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. Maksudnya untuk menilai prestasi kerja karyawan melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah diberikan.
- 3) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan nonfisik.
- 4) Indikator hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
- 5) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 6) Indikator dampak (*impact*) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dan pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional. Apabila

dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Domai, 2002).

Menurut Halim (2006:30), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini keterangan dari pengertian pengelolaan keuangan daerah :

a. Perencanaan keuangan daerah

Menurut Ahmad (2004:244), perencanaan keuangan daerah terdiri atas :

1) Proses penyusunan APBD

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah.

2) Proses penetapan APBD

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut disampaikan kembali ke DPRD.

3) Perubahan APBD

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun

anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan tersebut dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

b. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah (Ahmad, 2004:246).

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

c. Pelaporan keuangan daerah

Menurut Halim (2007:162), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya terdiri dari :

- 1) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode.
- 2) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada satu tanggal tertentu.
- 3) Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode serta posisi kas pada tanggal laporan.
- 4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

d. Pertanggungjawaban keuangan daerah

Menurut Ahmad (2004:250), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi
- 2) Kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam satu bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri dari :

- 1) Laporan perhitungan APBD
- 2) Nota perhitungan APBD
- 3) Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembayaran serta kinerja keuangan daerah.

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

e. Pengawasan keuangan daerah

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapat, pembelanjaan pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan Halim (2007:52). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan.

Devas (1989) mengemukakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah :

1) Pertanggungjawaban

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya pada lembaga yang sah.

2) Mampu memenuhi kewajiban

Kuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

3) Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur.

4) Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5) Pengendalian

Petugas keuangan pemerintahan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas dapat tercapai.

Menurut Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :

- a) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
- b) Perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya. Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan.
- c) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
- d) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah
- e) Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Menurut Ahmad (2004:234) asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kpatuhan dan kepatutan.

- b) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- c) Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN.
- d) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

a. Pengertian

Mulyadi (1993:165) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal pemerintah tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dalam PP No 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern (SPI) adalah

“suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Dalam PP No 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern yang selanjutnya disebut dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai berikut :

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

b. Ciri-ciri Sistem Pengendalian Intern yang Baik

Menurut Frederick E. Horn yang dikutip oleh Kosasih (1981:103) bahwa ciri-ciri suatu pengendalian intern yang memuaskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Di dalam pengendalian internal tersebut, terdapat pendelegasian wewenang kepada perorangan tertentu untuk mengetahui bahwa transaksi disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Di dalam pengendalian intern tersebut, akuntansi diselenggarakan sedemikian rupa sehingga catatan yang sama dapat dicek dengan catatan yang lain yang dibuat secara independen.
- 3) Adanya suatu pengendalian yang fisik dengan tepat.
- 4) Mempunyai pemisahan fungsi penyimpanan harta dari pencatatan dan pelaksanaan transaksi yang bersangkutan.
- 5) Dilakukannya verifikasi secara periodik terhadap keberadaan harta yang dicatat.
- 6) Pegawai yang digunakan memiliki kemampuan yang memadai.

c. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Amir (Devfi, 2008) komponen dari sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari :

- 1) Lingkungan pengendalian
 - a) Integritas dan nilai etika
 - b) Komitmen terhadap kompetensi

- c) Falsafah manajemen dan gaya operasi
- d) Struktur organisasi
- e) Dewan komisaris dan komite audit
- f) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
- g) Kebijakan dan prosedur kepegawaian.

2) Penilaian risiko

- a) Menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur pengendalian internal untuk meminimalkan salah saji
- b) Menilai dan bereaksi secara efektif terhadap risiko.

3) Aktivitas pengendalian

- a) Pemisahan kewajiban yang memadai
- b) Otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas
- c) Dokumen dan catatan yang memadai
- d) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
- e) Pemeriksaan independen atas pelaksanaan.

4) Informasi dan komunikasi

Tujuan informasi dan komunikasi akuntansi adalah untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva yang terkait.

5) Pemantauan

- a) Pemantauan dilaksanakan secara periodik
- b) Menilai kualitas intern.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dilakukan pengawasan internal dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan internal pemerintah.

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini, penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara kinerja paratur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *Good Governance*, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun salah satunya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin (2008) tentang konsep dan implikasi *Good Governance* di Kabupaten Bangka, disini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* salah satunya faktor manusia pelaksana dan faktor keuangan daerah yaitu aparatur pemerintah daerah yang kinerjanya dalam melayani masyarakat dan dalam mengelola keuangan daerah masih banyak ditemukan

praktik KKN di lingkungan daerahnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Jaeni (2003) tentang reformasi sistem pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan mekanisme *Good Governance*, disini ditemukan bahwa hubungan pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan *Good Governance* dapat dilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akuntansi dan anggaran daerah melalui tiga tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Syafrinal (2004) analisis kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disini ditemukan bahwa kinerja pegawai pemerintah Pesisir Selatan pada umumnya pegawai negeri relatif masih belum sesuai dengan harapan. Tingkat pendidikan dan pemberian fasilitas kendaraan kepada pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai sekretariat daerah Pesisir Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Devfi (2008) mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Objek penelitian adalah seluruh kantor cabang bank pemerintah dan swasta di Kota Padang. Peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel (total sampling).

Kiki Wardani (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap *good*

governance. Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Solok. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance* dan pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang menyatakan bahwa seluruh aparatur pemerintahan memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, dan masyarakat berhak mengawasi pelayanan ini. Dalam penerapan *Good Governance*, diharapkan aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan prima.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Manan (Wardani, 2010) yang menyatakan bahwa ada isu sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu *Good Governance* dan muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang *Good Governance*. *Good Governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penetapan *Good Governance*, dimana dengan menerapkan *Good Governance* diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsive, dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik

Good Governance karakter tersebut diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumberdaya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *Good Governance*.

Menurut Tanjuddin (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* yaitu :

a. Faktor manusia pelaksana (*man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *Good Governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local govt*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Disamping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu pegawai daerah itu sendiri.

b. Faktor partisipasi masyarakat (*public participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *Good Governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat (*public participation*). Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian *Good Governance* adalah sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

c. Faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *Good Governance*. Ini berarti

bahwa penerapan dan pemcapaian *Good Governance* di daerah atau lokal membutuhkan dana/finansial.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut jelas bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah akan mempengaruhi *Good Governance*, karena dengan adanya aparatur pemerintah yang berkualitas dan kompetitif maka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, aparatur pemerintahan daerah dituntut harus memiliki tingkat pendidikan, kedisiplinan dalam penyelesaian tugas, dapat bekerja dalam tim, dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, dan lain sebagainya. Maka dapat dinyatakan bahwa dengan adanya kinerja aparatur yang baik penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pembangunan.

Tajuddin (2008) tentang konsep dan implikasi *Good Governance* di Kabupaten Bangka, disini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* salah satunya faktor manusia pelaksana yaitu aparatur pemerintah daerah.

Perubahan paradigma memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat, meningkatkan keberdayaan partisipasi masyarakat serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Proses demokrasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta tingginya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, akan tetapi secara

fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk mewujudkan *Good Governance*, diperlukan aparatur pemerintahan yang baik dan handal yakni aparatur yang kondusif, responsif dan adaptif. Karakteristik yang diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *Good Governance*. Jadi kuat dugaan kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*.

2. Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2006:27). *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomi, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebelum reformasi baik menyangkut anggaran maupun akuntansi tidak mendukung mekanisme *Good Governance* bagi entitas pemerintahan yang merupakan cita-cita Indonesia baru yang didengungkan sejak RI memasuki era reformasi.

Menurut Arso (2012) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good*

Governance sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi/SKPD dapat terlihat.

Hubungan sistem pengelolaan keuangan untuk menciptakan *Good Governance* dilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akuntansi dan anggaran daerah melalui tiga tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yaitu masing-masing tahap meliputi input, proses dan output yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan APBD oleh Eksekutif baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada daerah. Tahap pengendalian inputnya berupa laporan pelaksanaan APBD kemudian diproses sebagai dasar evaluasi terhadap laporan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai penilaian pertanggungjawaban kepala daerah yang outputnya berupa keputusan hasil evaluasi maupun penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Jadi kuat dugaan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapann *Good Governance*.

3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pelaksanaan *Good Governance*

Mulyadi (1993 : 165) mendefinisikan sistem penendalian internal pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik atau lebih yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Harus diakui bahwa saat ini *Good Governance* masih belum terlaksana oleh bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kacamata akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *Good Governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Hal itu dialami oleh hampir seluruh pemerintah di Indonesia. Jika sistem pengendalian internal pemerintah tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud.

D. Kerangka Konseptual

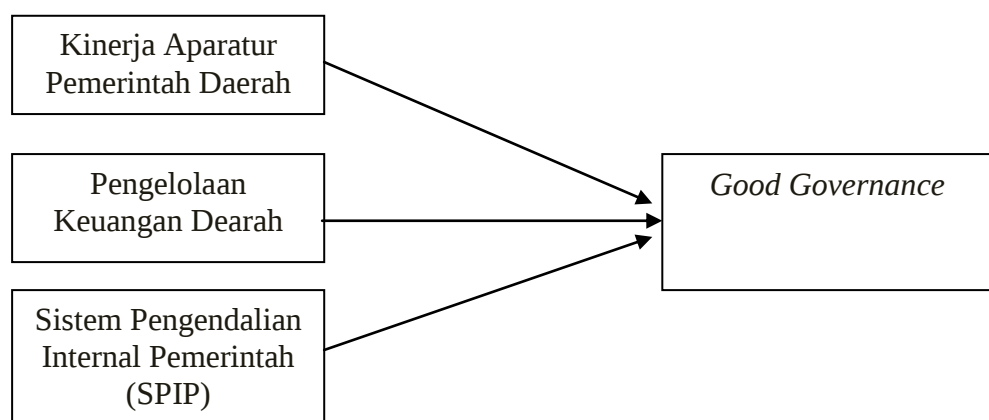
Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil serta relatif merata. Negara yang telah berhasil menerapkan *Good Governance* yaitu negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kinerja paratur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*. Dimana dengan menerapkan *Good Governance* diperlukan kinerja paratur pemerintah yang baik, kondusif, responsif dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik pemerintahan yang baik. Karakteristik ini diharapkan akan diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *Good Governance*.

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*. Dimana tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi, maupun pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*. Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi lima elemen yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran pengendalian internal telah dipenuhi. Elemen pengendalian internal tersebut adalah (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) aktivitas pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; (5) pemantauan. Sistem pengendalian internal pemerintah dikatakan efektif apabila kelima elemen tersebut berjalan dengan baik. Jika pengendalian intern telah efektif maka pelaksanaan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Untuk lebih jelasnya kaitan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*.
3. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kinerja pemerintah daerah dengan penerapan *good governance*. Semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka penerapan *good governance* pun akan semakin baik.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka penerapan *good governance* pun akan semakin baik.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif sistem pengendalian internal pemerintah dengan penerapan *good governance*.

B. Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan, tetapi penelitian ini masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner.
2. Selama penyebaran kuesioner, terdapat beberapa SKPD yang tidak bersedia mengisi kuesioner serta terdapat sejumlah responden yang dituju yang tidak mengisi kuesioner yang diberikan.

3. Data penelitian yang berasal dari responden disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat di pertimbangkan oleh berbagai pihak :

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga pemerintahan yang baik dapat terlaksana terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus cepat tanggap dalam menjelankan setiap keluhan publik atau masyarakat. Pegawai harus memiliki tingkat kreatifitas mencari tata kerja yang baik.
2. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pada pemerintah pusat, agar semua karakteristik *good governance* berjalan dengan baik dan optimal untuk mengantisipasi terjadinya praktek KKN pada lingkungan SKPD
3. Sistem pengendalian internal pemerintah sebaiknya menekankan kepada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut sehingga sistem pengendalian internal pemerintah bisa berjalan secara optimal.

4. Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*, seperti implementasi *financial audit*, *value for money* audit dan peran auditor internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin .A, Randal J.Elder, dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance pendekatan terintegrasi jilid 1*, Jakarta :Erlangga
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Devfi, Agustina. 2008. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*. *Skripsi*. UNP. Padang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gusmal, 2007. *Lakip Pemerintah Kabupaten Solok 2007*. Solok
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Husen, Umar. 2008. *Desain Penelitian Akutansi Keperilakukaan*. Jakarta : Rajawali Pres
- Jaeni. 2006. Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menciptakan Mekanisme *Good Governance*. Jurnal. Semarang. STIEStikubank.
- Mahsun, Mohammad Dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mulyadi. 1993. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: YKP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restruksi dan pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.

- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) membangun manajemen kinerja guna meningkatkan produktifitas menuju good governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Syafrinal, 2004. Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Tesis. Padang. MM UNP.
- Wahyudi, Kurnia. 2009. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Peran Auditor Internal dan Pengawasan dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang. Skripsi. UNP. Padang.
- Wardani , Kiki. 2010. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*. Skripsi. UNP. Padang
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Padang, Oktober 2012

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/I Responden
Di Tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya saya mendoakan semoga Bapak/Ibu/Sdr/I dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses selalu, Amin. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Adapun identitas saya adalah sebagai berikut :

Nama : Depi Oktia Ruspina
Nim : 05344
BP : 2008

Saat ini saya sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun, kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir), untuk skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang)”**.

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu/Sdr/I akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban pada kuesioner yang terlampir. Bapak/Ibu/Sdr/i dimohonkan untuk memberikan tanda *check list* (✓) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/I mengenai pernyataan/pertanyaan yang diberikan.

Demikianlah surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I saya ucapkan terima kasih.

Pihak Penerima

Hormat Saya,

()

Depi Oktia Ruspina

KUESIONER

A. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi daftar pertanyaan berikut :

Nama :

Umur :Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Perempuan ☐ Laki-laki

Nama SKPD :

Kuesioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja

1. Jenjang pendidikan formal yang Bapak/Ibu/Sdr/I tempuh :

- | | |
|-------|---------|
| a. S2 | d. D1 |
| b. S1 | e. SLTA |
| c. D3 | |

2. Bidang keahlian (Pendidikan) Bapak/Ibu/Sdr/I yang telah ditempuh :

- | | |
|--------------|-------------------------|
| a. Akuntansi | d. Hukum |
| b. Manajemen | e. Ilmu lainnya (.....) |
| c. Teknik | |

3. Berapa lama Bapak/Ibu/Sdr/I bekerja di SKPD ini :

- | | |
|--------------|--------------|
| a. > 5 Tahun | d. 2 Tahun |
| b. 4 Tahun | e. < 2 Tahun |
| c. 3 Tahun | |

B. Daftar Pertanyaan

Mohon Bapak/Ibu/Sdr/I memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu/Sdr/I.

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

RR = Ragu-Ragu

1. Penerapan *Good Governance*

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
2.	Adanya kerangka hukum yang kuat merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
3.	Kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat, dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
4.	Informasi yang tersedia dapat dimengerti merupakan perwujudan dari transparansi pemerintah.					
5.	Penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai daya tanggap (<i>responsive</i>) akan menciptakan tata pemerintahan yang baik.					
6.	Pemerintah daerah tidak akan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.					
7.	Tidak adanya keterbukaan pemerintah akan menciptakan tata pemerintahan yang baik.					
8.	Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.					
9.	Pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efisien dan efektif tidak akan menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					

10.	Diterapkannya tata pemerintahan yang baik akan meningkatkan efisien dan efektivitas.					
11.	Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas akan membangun tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).					
12.	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak harus memiliki visi yang jauh kedepan.					
13.	Kegiatan operasional yang efisien apabila suatu hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang serendah-rendahnya.					

2. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai dengan tingkat pendidikannya.					
2.	Pegawai selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.					
3.	Pegawai dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaannya.					
4.	Pegawai yang memiliki kualitas kerja yang baik atau tinggi diberikan penghargaan.					
5.	Pegawai bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan.					
6.	Pegawai cepat dan tanggap dalam menjelaskan setiap keluhan publik/masyarakat.					
7.	Pegawai memiliki tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik.					
8.	Pegawai memiliki tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan.					
9.	Pegawai ikut serta dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengann bidang tugasnya.					
10.	Pegawai dituntut lebih kreatif dan inovatif.					

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	APBD disusun dengan pendekatan kinerja.					
2.	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.					
3.	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.					
4.	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
5.	Tindakan yang mengakibatkan atas beban APBD tidak akan dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.					
6.	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan.					
7.	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum.					
8.	Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.					
9.	Dilakukannya <i>financial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah.					
10.	Dilakukannya <i>value for money audit</i> terhadap laporan keuangan daerah.					

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pemerintah daerah memiliki integritas dan nilai-nilai etika.					
2.	Pemerintah daerah memiliki komitmen terhadap kompetensi.					
3.	Mempunyai falsafah manajemen dan gaya operasi					

4.	Dalam instansi terdapat stuktur organisasi yang jelas.					
5.	Memiliki dewan komisaris atau komite audit atau yang setara dengan dewan komisaris atau komite audit.					
6.	Adanya pelimpahan tugas dan wewenang dalam organisasi.					
7.	Adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian.					
8.	Adanya penilaian terhadap risiko.					
9.	Adanya penetapan metode pengukuran.					
10.	Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko.					
11.	Adanya penetapan pengendalian internal.					
12.	Terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal.					
13.	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.					
14.	Sistem informasi telah berfungsi dengan baik.					
15.	Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan.					
16.	Pemisahan kewajiban telah diterapkan secara memadai.					
17.	Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.					
18.	Adanya dokumen yang memadai terhadap setiap transaksi dan aktivitas.					
19.	Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.					
20.	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.					
21.	Pemantauan dilaksanakan secara periodik.					
22.	Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal.					